

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Arief. Barda Nawawi. 2008. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- Bahri. Syaiful. 2009. *Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia*. Yogyakarta: Total Media.
- E, Utrecht. 1958. *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana 1*. Surabaya : Pustaka Tinta Mas.
- Effendi, Erdianto. 2014. *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Ekaputra & Mohammad dan Abul Khair. 2010. *Sistem Pidana Di Dalam KUHP Dan Pengaturannya Menurut Konsep KUHP Baru*. Medan : USU Press.
- Hamzah, Andi. 2008. *Terminologi Hukum Pidana*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Jamilah, Fitrotin. 2014. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta : Dunia Cerdas.
- Lamintang, P. A . F . dan The Lamintang. 2012. *Hukum Penitensier Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Lamintang, P. A . F . dan Franciscus Theojunior Lamintang. 2014. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Marlina. 2011. *Hukum Penitensier*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2006. *Penelitian Hukum Cetakan kedua*. Jakarta : Kencana.
- Prasetyo, Teguh. 2014. *Hukum Pidana*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Priyatno, Dwidja. 2013. *Sistem Pelaksana Pidana Penjara di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Prokoso, Abintoro. 2019. *Hukum Penitensier*. Yogyakarta : Aswaja Pressindo.
- Renggong, Ruslan. 2016, *Hukum Pidana Khusus: Memahami Delik-delik di Luar KUHP*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2013. *Penelitian Hukum Normatif*. RajaGrafindo Persada: Jakarta.

Soemitro, Rony Hanitijo. 1995. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Soesilo, R. 1996. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor : Politeia.

Suseno, Sigid. Dan Nella Sumika Putri. 2013. *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.

Waluyo,Bambang.2008. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta : Sinar Grafika.

Artikel dalam Jurnal :

Ahmad Mahyani. Harmonisasi Hak Pistolee Dengan Ketentuan Fasilitas Narapidana. *Jurnal Ilmu Hukum* Volume 15, Nomor 1, tahun Februari 2019 – Juli 2019.

Galih Puji Mulyono, Barda Nawawi Arief. Upaya Mengurangi Kepadatan Narapidana Dalam Lembaga Pemasyarakatan DI Indonesia. *Jurnal Law Reform Program Studi Magister Ilmu Hukum* Volume 12, Nomor 1, Tahun 2016.

Skripsi :

Dyanita Ainun Fatwa. Kebermaknaan Hidup Narapidana Yang Mendapat Vonis Hukuman Seumur Hidup Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Madium. Skripsi Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Psikologi Program Pendidikan Strata 1 Psikologi. Program Studi Psikologi Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret Surakarta Tahun 2010.

I Gede Santi Adnyana. Implementasi Sistem Pembinaan Narapidana dalam Tahap Asimilasi pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja. Skripsi Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana hukum. Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti Tahun 2018.

Komang Ayu Triandari Purwanto. Implementasi Hukum Perlindungan Saksi dan Korban terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B

Singaraja. Skripsi Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana hukum. Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha Tahun 2019.

Internet atau Website :

<https://kamushukum.web.id>

<https://www.nusabali.com/berita/62156/lapas-kelas-iib-singaraja-gagalkan-penyeludupan-sabhu>

Kamus Besar Bahasa Indonesia Online (KBBI Online).

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/restitusi>, tanggal 30 September 2018

<https://lapassingaraja.tech/merubahsangkarmenjadisanggar>

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasarakatan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 mengenai Tata Tertib Lembaga Pemasarakatan dan Rumah Tahanan Negara

Surat Edaran Dirjen Pemasarakatan No. PAS-09.PK.04.01 Tahun 2009 tentang Larangan Penggunaan Handphone di Lapas/Rutan/Cabang Rutan jis.

Surat Edaran Dirjen Pemasarakatan No. PAS-01.01.04.01 Tahun 2012 tentang Pencegahan dan Penindakan Terhadap Penggunaan Handphone di Lapas, Rutan, dan Cabang Rutan.

Surat Edaran Nomor Pas-30.Pk.01.04.01 Tahun 2013 Tentang Tindak Lanjut Hasil Penggeledahan Barang-Barang Terlarang di Lembaga Pemasarakatan, Rutan Dan Cabang Rutan.